



BUPATI KOLAKA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR 63 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat desa, dipandang perlu untuk mengatur tata cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Dusun;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 7 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu mengatur Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Dusun dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DUSUN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Camat adalah Pimpinan Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa yang ada dalam wilayah Kabupaten Kolaka.
12. Kepala Dusun merupakan salah satu perangkat Desa yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
13. Pembentukan Dusun adalah tindakan mengadakan Dusun baru di luar Dusun yang ada.

14. Penghapusan Dusun adalah tindakan meniadakan Dusun yang ada akibat tidak memenuhi persyaratan.
15. Penggabungan Dusun adalah penyatuan dua Dusun atau lebih menjadi Dusun baru.
16. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Hari adalah hari kerja.

## BAB II PEMBENTUKAN DUSUN

### Pasal 2

Dalam wilayah Desa dibentuk Dusun sesuai dengan asal usul, adat istiadat dan wilayah sosial budaya masyarakat Desa.

#### Bagian Kesatu Tujuan Pembentukan Dusun

### Pasal 3

Pembentukan Dusun bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

#### Bagian Kedua Tata Cara Pembentukan Dusun

### Pasal 4

- (1) Dusun dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan perkembangan penduduk setempat.
- (2) Pembentukan Dusun dapat dilakukan dengan mekanisme penggabungan beberapa Dusun, bagian Dusun yang bersandingan, dan pemekaran dari 1 (satu) Dusun menjadi 2 (dua) Dusun atau lebih.
- (3) Pembentukan Dusun dengan mekanisme pemekaran dari 1 (satu) Dusun menjadi 2 (dua) Dusun atau lebih dapat dilakukan setelah Dusun induk mencapai usia sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- (4) Pembentukan Dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat Persetujuan Bupati dalam bentuk Keputusan Bupati atas usul dan prakarsa masyarakat yang disampaikan oleh Kepala Desa dengan mengetahui Camat.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (4) tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### Pasal 5

- (1) Untuk membantu memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam Pembentukan Dusun, Bupati membentuk Tim Penataan Dusun untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan Pembentukan Dusun.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 6

Tata cara Pembentukan Dusun adalah sebagai berikut :

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk Dusun;
- b. masyarakat mengajukan usulan Pembentukan Dusun kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. Kepala Desa membentuk Tim Pembentukan Dusun;
- d. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa mengikutsertakan Tim Pembentukan Dusun dan dihadiri Camat untuk membahas usul masyarakat tentang rencana Pembentukan Dusun, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang rencana Pembentukan Dusun;
- e. Kepala Desa menyampaikan rencana Pembentukan Dusun kepada Bupati melalui Camat paling sedikit melampirkan :
  1. Aspirasi/dukungan masyarakat;
  2. Berita Acara Hasil Rapat Kepala Desa bersama BPD;
  3. keputusan Kepala Desa tentang Tim Pembentukan Dusun;
  4. data situasi dan kondisi dusun yang memuat tentang jumlah penduduk dan Kepala Keluarga, luas wilayah, persebaran penduduk, batas wilayah Dusun; dan
  5. peta wilayah Dusun.
- f. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Penataan Dusun untuk melakukan verifikasi persyaratan pembentukan dusun yang akan dibentuk dan hasilnya menjadi bahan rekomendasi Bupati;
- g. bila rekomendasi Tim Penataan Dusun menyatakan layak dibentuk dusun baru, Bupati memberikan persetujuan dalam bentuk Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dusun;
- h. rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada pimpinan BPD dilakukan pembahasan bersama dalam musyawarah Desa mengikutsertakan Tim Penataan Dusun, Camat dan unsur masyarakat desa;
- i. rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun yang telah disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- j. penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disepakati bersama;

- k. rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disepakati bersama; dan
- l. Kepala Desa melalui Camat menyampaikan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

#### Pasal 7

Verifikasi persyaratan Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f berupa :

- a. verifikasi administrasi dilakukan dengan meneliti dokumen persyaratan Pembentukan Dusun; dan
- b. verifikasi teknis dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan.

#### Pasal 8

Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b untuk :

- a. verifikasi ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah;
- b. verifikasi faktual kondisi keeratan kelompok sosial, kondisi adat dan tradisi di wilayah calon Dusun;
- c. verifikasi syarat jumlah penduduk calon Dusun; dan
- d. verifikasi batas wilayah calon dusun dalam peta Desa.

### Bagian Ketiga

#### Persyaratan Pembentukan Dusun

#### Pasal 9

Persyaratan Pembentukan Dusun harus memperhatikan :

- a. setiap Dusun memiliki jumlah penduduk paling sedikit 195 (seratus sembilan puluh lima) jiwa atau 65 (enam puluh lima) Kepala Keluarga;
- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. permukiman penduduk tidak berada di daerah terlarang, sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, tidak termasuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan zona rawan bencana;
- d. adanya aspirasi masyarakat dan persetujuan Pemerintah Desa;
- e. keberadaan sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- f. potensi Dusun yang meliputi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat dengan memperhatikan pelestarian lingkungan;
- g. batas Dusun yang dinyatakan dalam bentuk batas alam dan/atau batas buatan;
- h. sarana dan prasarana, yaitu tersedianya potensi infrastruktur wilayah Dusun;

- i. tersedia atau dapat menyediakan sarana prasarana, operasional penghasilan tetap dan tunjangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Dusun yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- j. surat pernyataan Kepala Desa tentang kesanggupan untuk menyiapkan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Dusun.

#### Pasal 10

- (1) Hasil kajian dan verifikasi persyaratan calon Dusun oleh Tim Penataan Dusun dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan kelayakan dibentuknya Dusun baru.
- (2) Rekomendasi yang menyatakan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk memberikan persetujuan Pembentukan Dusun baru yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III

#### PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DUSUN

#### Pasal 11

Tata cara Penghapusan dan Penggabungan Dusun adalah sebagai berikut:

- a. Dusun yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai suatu Dusun dapat dihapus dan/atau dapat digabung dengan Dusun terdekat;
- b. Kepala Desa membentuk Tim Penghapusan dan/atau Penggabungan Dusun;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa mengikutsertakan Tim Penghapusan dan/atau Penggabungan Dusun dan dihadiri Camat untuk membahas rencana Penghapusan dan/atau Penggabungan Dusun, kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang rencana Penghapusan dan/atau Penggabungan Dusun;
- d. Kepala Desa menyampaikan rencana Penghapusan dan/atau Penggabungan Dusun kepada Bupati melalui Camat paling sedikit melampirkan :
  1. Berita Acara Hasil Rapat Kepala Desa bersama BPD;
  2. keputusan Kepala Desa tentang Tim Penghapusan dan/atau Penggabungan Dusun;
  3. data situasi dan kondisi dusun yang memuat tentang jumlah penduduk dan Kepala Keluarga, luas wilayah, persebaran penduduk, batas wilayah Dusun; dan
  4. peta wilayah Dusun.
- e. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Penataan Dusun untuk melakukan verifikasi persyaratan Penghapusan dan/atau Penggabungan Dusun dan hasilnya menjadi bahan rekomendasi Bupati;
- f. bila rekomendasi Tim Penataan Dusun menyatakan layak dihapus atau digabung, Bupati memberikan persetujuan dalam bentuk

- Keputusan Bupati tentang Penghapusan dan/atau Penggabungan Dusun;
- g. rancangan Peraturan Desa tentang Penghapusan dan/atau Penggabungan Dusun yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada pimpinan BPD dilakukan pembahasan bersama dalam musyawarah Desa mengikutsertakan Tim Penataan Dusun, Camat dan unsur masyarakat Desa;
  - h. rancangan Peraturan Desa tentang Penghapusan dan/atau Penggabungan Dusun yang telah disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
  - i. penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Penghapusan dan/atau Penggabungan Dusun sebagaimana dimaksud pada huruf h, disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disepakati bersama;
  - j. rancangan Peraturan Desa tentang Penghapusan dan/atau Penggabungan Dusun sebagaimana dimaksud pada huruf i, ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disepakati bersama; dan
  - k. Kepala Desa melalui Camat menyampaikan Peraturan Desa tentang Penghapusan dan/atau Penggabungan Dusun kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

#### BAB IV

#### NAMA, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH DUSUN

##### Pasal 12

- (1) Pemberian nama, penentuan batas dan pembagian wilayah Dusun berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- (2) Sebagai batas antar wilayah Dusun yang satu dengan wilayah Dusun yang lain, ditetapkan batas wilayah Dusun dalam Peraturan Desa.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa batas alam dan/atau batas buatan.
- (4) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB V

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 13

- (1) Dusun yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap diakui keberadaannya.
- (2) Kepala Desa menunjuk Pelaksana tugas kepala Dusun hasil Pembentukan Dusun sebelum ditetapkannya Kepala Dusun definitif dengan surat perintah tugas.
- (3) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari salah seorang Perangkat Desa definitif.

- (4) Surat perintah tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (5) Masa jabatan pelaksana tugas Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan.
- (6) Mekanisme pengisian dan pengangkatan Kepala Dusun oleh Kepala Desa sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal 29 Desember 2023



Plt. BUPATI KOLAKA,

*Muhammad Jayadin*  
MUHAMMAD JAYADIN

Diundangkan di Kolaka  
Pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA

*Muhammad Bakri*  
MUHAMMAD BAKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023 NOMOR 63

PENJELAS ATAS  
PERATURAN BUPATI KOLAKA  
NOMOR 63 TAHUN 2023  
TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DUSUN

I. UMUM

Dengan memperhatikan kebutuhan pengaturan terkait penataan dusun di Kabupaten Kolaka serta untuk mengisi kekosongan regulasi, maka di pandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan dusun sebagai salah satu dasar penataan desa sesuai Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa tentang penyelenggaraan Pemerintahan di Desa.

Peraturan Bupati menjadi prioritas utama, mengingat di Kabupaten

Kolaka terdapat kekosongan regulasi tentang Penataan Dusun, maka diharapkan dengan terbitnya Peraturan Bupati tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan dusun, Pemerintah Desa memiliki dasar hukum yang jelas dalam menata wilayah Desa utamanya Penataan Dusun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukupjelas

Pasal 3

Cukupjelas

Pasal 4

Cukupjelas

Pasal 5

Cukupjelas

Pasal 6

Cukupjelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukupjelas

Pasal 9

Huruf a

Cukupjelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Tidak berada di wilayah yang dilarang oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku

Huruf d

Cukupjelas

Huruf e

Cukupjelas

Huruf f

Cukupjelas

Huruf g

Cukup jelas  
Huruf h  
Cukup jelas  
Huruf i  
Cukup jelas  
Huruf j  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas

  
PE. BUPATI KOLAKA,  
  
MUHAMMAD JAYADIN

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 63